

## ABSTRAK

### **Rian Septian (1163030058): Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pengalokasian Dan Transparansi Dana Desa Di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah**

Dana desa sejatinya digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, akan tetapi dalam prakteknya sering terjadi penyalahgunaan pengalokasiannya, menurut Peraturan Menteri Desa, dana desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Begitupun dengan transparansinya, pemerintah desa harus transparan dalam hal menyampaikan segala informasi terkait dengan dana desa itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan terkait pengalokasian dan transparansi dana desa pada tahun 2019 di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian dana desa dan transparansinya ditinjau dari siyasah dusturiyah.

Dalam Undang-undang no 6 Tahun 2014 pasal 74, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembanagan yang disepakati dalam musyawarah desa. Kemudian ditinjau dari prinsip siyasah dusturiyah yakni prinsip masalah, prinsip syuro, dan prinsip amanah, terkait dengan mekanisme pengalokasian dan transparansi dana desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, dimana instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris pengalokasian dan transparansi dana desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan observasi nonpartisipan guna memperoleh data mengenai pengalokasian dan transparansi dana desa. Dengan berdasarkan data yang ada, peneliti berupaya mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian dan transparansi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mertapada Kulon belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Mertapada Kulon kurang koordinasi antar stakeholder dan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya terkadang berbeda dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu masih terdapat aparatur pemerintah desa yang belum paham mengenai Alokasi Dana Desa, sehingga kegiatan-kegiatan yang di bangun untuk memberikan manfaat kepada masyarakat belum bisa dimaksimalkan.

**Kata Kunci :** Alokasi, Transparansi, Dana Desa.

## ABSTRACT

### **Rian Septian (1163030058): Implementation of Law No. 6 of 2014 concerning Villages in the Allocation and Transparency of Village Funds in Mertapada Kulon Village, Astanajapura District, Cirebon Regency Viewed From Siyasa Dusturiyah**

Village funds are actually used for the welfare of the people, but in practice there is often misuse of their allocation, according to the Village Ministerial Regulation, village funds are prioritized to finance the implementation of programs and activities in the field of village development and community empowerment. Likewise with transparency, the village government must be transparent in terms of conveying all information related to the village fund itself.

This research was conducted in relation to the allocation and transparency of village funds in 2019 in Mertapada Kulon Village, Astanajapura District, Cirebon Regency. This study aims to determine the allocation of village funds and their transparency in terms of siyasah duturiyah.

In Law 6/2014 article 74, village expenditure is prioritized to meet development needs agreed upon in village deliberations. Then it is reviewed from the siyasah duturiyah principle, namely the masalah principle, the syuro principle, and the trust principle, related to the mechanism for allocating and transparency of village funds.

The method used in this research is a qualitative method with a descriptive analysis approach, where the main instrument in this study is the researcher himself. The data sources used are primary data sources and secondary data sources relating to the empirical situation and conditions of the allocation and transparency of village funds. In this study, researchers used semi-structured interview techniques and non-participant observation in order to obtain data on the allocation and transparency of village funds. Based on existing data, the researcher seeks to describe and describe systematically and accurately the facts, characteristics, and relationships between existing phenomena.

The results of this study indicate that the allocation and transparency of village funds carried out by the Mertapada Kulon Village government are not fully in accordance with the applicable laws and regulations. This is because the Mertapada Kulon Village Government lacks coordination between stakeholders and the community, so that the implementation sometimes differs from the stipulated provisions. In addition, there are village government officials who do not understand the Village Fund Allocation, so that activities that are built to provide benefits to the community cannot be maximized.

Keywords: Allocation, Transparency, Village Fund.